

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Posisi Indonesia yang berada di antara tiga lempeng besar dunia telah mengakibatkan Indonesia menjadi sangat rentan terhadap bencana. Kejadian bencana ini telah merenggut banyak korban jiwa dan mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Populasi penduduk Indonesia yang semakin padat dan kebutuhan ruang untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.

Kejadian bencana alam di Indonesia yang berulang, baik jenis yang sama maupun berbeda, mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. Pada tahun 2005 telah disepakati sebuah kerangka kerja yang bernama *Hyogo Framework for Action (HFA)* dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe. Kerangka kerja tersebut mengamankan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan risiko bencana (UNISDR dalam Yamani, 2015 : 1). Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan, baik di negara-negara maju maupun

negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural, yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (*community resilience*) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan *hinterland* bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus berperan dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu telah terjadi kerusakan pada daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk. Hujan yang turun dalam durasi waktu 4 jam pada tanggal 20 September 2016 di wilayah Garut telah menyebabkan meluapnya Sungai Cimanuk hingga menyebabkan banjir bandang. Banjir yang datang dengan membawa lumpur menerjang pada pukul 22.00 WIB sehingga sebagian masyarakat sudah terlelap tidur. Banjir ini melanda 6 kecamatan yaitu Garut Kota, Bayongbong, Karangpawitan, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan Banyuwesi. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir disinyalir terjadi karena DAS Cimanuk dalam kondisi kritis dan telah mengalami pendangkalan serta penyempitan juga tutupan hutan yang terdapat di Kabupaten Garut tak seimbang dengan DAS yang ada, dan masalah tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan (BNPB, 2016). Wilayah Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam DAS Cimanuk. Area yang termasuk DAS Cimanuk meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu (BNPB, 2016).

Menurut Dinas Kehutanan Jawa Barat, DAS Cimanuk rusak akibat aktivitas penambangan pasir yang sudah berlangsung belasan tahun. Para penambang selain mengeruk pasir di dasar sungai, juga mengikis tepian bantaran sungai untuk mendapatkan kerikil sehingga terjadi longsor di banyak titik sepanjang DAS. Hampir seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang ada di Jawa Barat telah mengalami kerusakan berat. Kerusakan DAS terutama terjadi pada hulu sungai di daerah penyangga atau kawasan hutan lindung. Kerusakan DAS inilah yang antara lain memicu terjadinya banjir. Permasalahan besar yang dialami DAS Cimanuk pada saat ini adalah gundulnya hutan di wilayah hulu

(Mulyono, 2010 : 283-284). Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2016), secara umum banjir bandang yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Cimanuk disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Curah hujan tinggi yang mengakibatkan debit air di Sungai Cimanuk bertambah besar.
- b. Vegetasi di daerah hulu Sungai Cimanuk dan anak sungainya kurang mampu menyimpan air.
- c. Erosi lateral oleh aliran sungai Cimanuk yang menyebabkan sedimentasi yang tinggi.
- d. Topografi lereng di daerah hulu memiliki presentasi kemiringan lereng 14-55% atau masuk dalam klasifikasi agak curam.

Menurut data Departemen Pekerjaan Umum (Mulyono, 2010 : 284), tahun 2010 luas lahan kritis di DAS Cimanuk telah mencapai 131.384 ha atau sekitar 36,6 % dari total luas DAS. Lebih lanjut Sungai Cimanuk ini terkenal dengan arus air yang sangat deras pada musim hujan sehingga membawa lapisan tanah bagian atas (*top soil*) yang subur dan mengakibatkan lahan cepat menjadi kritis. Menurut hasil pengamatan pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut pada tahun 2009, menunjukkan bahwa kondisi area hutan di DAS Cimanuk sangat memprihatinkan. Dari total luas hutan sebesar 17.000 Ha, paling sedikit ada lahan hutan seluas 3.993,45 Ha yang rusak akibat tindakan perambahan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sejumlah lokasi yang rusak tersebut meliputi 376,41 Ha berada di kawasan Limbangan, Kadungora, dan Tarogong, 2.126,62 Ha berada di kawasan Cisurupan dan Simpang Bayongbong serta 1.490,42 Ha berada di kawasan Mandalagiri, Cikajang (Mulyono, 2010 : 286).

Tabel 1.1 Kejadian Bencana Banjir Kabupaten Garut

Waktu	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)		
		Meninggal & Hilang	Luka-Luka	Menderita & Mengungsi
2003	1	58	74	1796
2005	1	0	0	11

2009	3	0	0	320
2010	12	1	8	0
2011	2	13	7	1405
2012	4	0	0	7499
2013	4	0	0	3887
2014	11	1	0	5906
2015	5	0	0	1200
2016	14	54	9	9387

---

*Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2016*

Banjir di wilayah Garut pada bulan September 2016 telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 19 orang hilang, 35 orang mengalami luka-luka serta pengungsi paling tinggi tercatat sebanyak 6.361 orang. Selain itu dampak lainnya adalah kerusakan pada rumah dan bangunan vital. Tercatat hingga akhir bulan September lebih dari 1.700 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga sedang. Fasilitas vital yang juga turut menjadi korban adalah rumah sakit, dimana karena terendam banjir beberapa peralatan elektronik maupun yang bukan mengalami kerusakan dengan taksiran kerugian mencapai 2,8 M. Lebih dari 40 sekolah mengalami kerusakan yang menyebabkan 2 ribuan peserta didik terkendala dalam kegiatan belajar mengajar (BNPB, 2016). Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir cukup besar sehingga pembuatan peta untuk menentukan zona risiko banjir berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) diperlukan sebagai langkah dalam mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana banjir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kabupaten Garut”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini didasari oleh kejadian bencana banjir di Kabupaten Garut. Penelitian ini hanya dibatasi pada tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Garut.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : “Bagaimana sebaran tingkat kapasitas di Kabupaten Garut dalam menghadapi banjir?”

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai sarana menambah wawasan dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang terkait dengan kebencanaan, khususnya bencana banjir. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bahan masukan untuk penelitian sejenis dengan obyek lebih luas.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan serta dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Sebagai informasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak dan kerugian bencana banjir.